

**ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2008 – 2012**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

KUS ENDANG MUJI RAHAYU

B 200 090 032

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:
**"ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN
2008 – 2012"**

Yang ditulis oleh:

KUS ENDANG MUJI RAHAYU

B 200 090 032

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 16 Januari 2014

Pembimbing,



(Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2008 - 2012**

**Kus Endang Muji Rahayu
B 200 090 032**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAKSI: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008-2012. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, serta Rasio Pengelolaan Belanja.

Hasil penelitian, rasio kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 9,04% dari rata-rata pertahunnya atau berada pada pola hubungan instruktif. Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih kurang, yaitu sebesar 8,07% dan 9,76%. Pada rasio kesenjangan, pengeluaran belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yaitu 14,54% untuk rasio belanja modal dan sebesar 84,55% untuk rasio belanja operasi sehingga terdapat *gap* sebesar 70,01%. Rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 15,61%, atau peningkatan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja modal, tetapi diikuti oleh pertumbuhan belanja operasi. Kontribusi PAD terhadap APBD masih kurang, yaitu sebesar 15,61%. Pada rasio efektivitas dan efisiensi PAD dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan sudah berjalan secara efektif dan efisien. Dan pada rasio pengelolaan belanja, kinerja pengelolaan belanja pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dikatakan baik karena meningkatnya realisasi atas pendapatan dari pemerintah Kabupaten Grobogan.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Dari Undang-Undang tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan bahwa APBD sebagai suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam waktu satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang, tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, dimana tujuan tersebut paling tidak untuk

meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran saja, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002: 299).

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan biasanya membutuhkan laporan keuangan selama sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir dari berjalannya perusahaan.

Untuk selanjutnya dari perhitungan dengan perbandingan rasio dapat diketahui atau diukur kinerjanya. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen. Penilaian kinerja dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian Powa dan Wokas (2012). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Grobogan, tahun anggaran yang digunakan 2008-2012 dan adanya tambahan indikator analisis rasio keuangan yaitu Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Rasio Pengelolaan Belanja. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008-2012”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2008-2012 berdasarkan indikator analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio pengelolaan belanja?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2008-2012 berdasarkan indikator analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio pengelolaan belanja.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2002).

American Accounting Assosiation (1970) dalam Glynn (1993) yang dialihkan bahasanya dalam buku Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Mamesah (Halim, 2002) dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. *Value for Money*

3. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mengukur kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan tersebut dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan menilai efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya pengukuran kinerja memungkinkan bagi unit kerja pemerintahan untuk memonitor kinerja dalam menghasilkan keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) terhadap masyarakat, sehingga bermanfaat untuk membantu pimpinan instansi dalam memonitor dan memperbaiki kinerja serta fokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya, prinsip penyusunan anggaran adalah: sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya, tepat waktu, transparan, partisipatif, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

5. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah salah satu cara untuk membuat perbandingan data keuangan, sebagai dasar untuk mengetahui kinerja keuangan suatu lembaga. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Analisis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{sumber pendapatan dari pihak ekstern}} \times 100\%$$

Paul Harsey dan Kennerth Blancard memperkenalkan “hubungan situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2002):

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim (2001)

b. Rasio derajat desentralisasi fiskal

Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan cara membandingkan PAD dan total pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keadilan pembagian sumber daya daerah dalam bentuk bagi hasil pendapatan sesuai potensi daerah terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{DDF} = \frac{\text{PAD}_t}{\text{TPD}_t} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t : Total PAD Tahun t

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun t

c. Rasio indeks kemampuan rutin

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yaitu proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. Pengeluaran rutin dalam penelitian ini adalah pengeluaran biaya operasi. Semakin tinggi rasio indeks kemampuan rutin, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

$$\text{Indeks kemampuan rutin} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

d. Rasio keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Rasio ini untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

$$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

e. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$1) \text{ Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD } P_n - P_{n-1}}{\text{PAD } P_{n-1}} \times 100\%$$

$$2) \text{ Pertumbuhan total pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan } P_n - P_{n-1}}{\text{Pendapatan } P_{n-1}} \times 100\%$$

$$3) \text{ Pertumbuhan belanja operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi } P_n - P_{n-1}}{\text{Belanja Operasi } P_{n-1}} \times 100\%$$

$$4) \text{ Pertumbuhan belanja modal} = \frac{\text{Belanja Modal } P_n - P_{n-1}}{\text{Belanja Modal } P_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : Tahun yang dihitung

P_{n-1} : Tahun sebelumnya

f. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

g. Rasio pengelolaan belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah.

$$\text{Rasio pengelolaan belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, obyek,

atau peristiwa. Dalam hal ini mendapatkan gambaran tentang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan apabila ditinjau melalui analisis rasio keuangan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data tersebut merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2012. Sumber data dari penelitian ini diperoleh langsung dari bagian keuangan kantor DPPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan studi kepustakaan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{sumber pendapatan dari pihak ekstern}} \times 100\%$
2. Rasio DDF = $\frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$
3. Rasio Indeks kemampuan rutin = $\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$
4. Rasio Keserasian:
 - a. Rasio belanja operasi = $\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja APBD}}$
 - b. Rasio belanja modal = $\frac{\text{Total Belanja modal}}{\text{Total Belanja APBD}}$
5. Rasio Pertumbuhan:
 - a. Pertumbuhan PAD = $\frac{\text{PAD } P_n - P_{n-1}}{\text{PAD } P_{n-1}} \times 100\%$
 - b. Pertumbuhan total pendapatan = $\frac{\text{Pendapatan } P_n - P_{n-1}}{\text{Pendapatan } P_{n-1}} \times 100\%$
 - c. Pertumbuhan belanja operasi = $\frac{\text{Belanja Operasi } P_n - P_{n-1}}{\text{Belanja Operasi } P_{n-1}} \times 100\%$
 - d. Pertumbuhan belanja modal = $\frac{\text{Belanja Modal } P_n - P_{n-1}}{\text{Belanja Modal } P_{n-1}} \times 100\%$
6. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD:
 - a. Rasio efektifitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$
 - b. Rasio efisiensi = $\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Total Pendapatan}}} \times 100\%$
7. Rasio Pengelolaan Belanja = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$

HASIL PENELITIAN

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
 = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{sumber pendapatan dari pihak ekstern}} \times 100\%$

TA	Total Pendapatan	PAD		%	SPE		%	Rasio Kemandirian	Pola
		Rp	Perkembangan		Rp	Perkembangan			
2008	813.076.812.507	59.924.849.995	-	7,37%	721.153.478.262	-	8,31%	88,69%	Instruktif
2009	843.180.476.379	77.079.602.181	22,26%	9,14%	753.877.574.198	4,34%	10,22%	89,41%	Instruktif
2010	943.967.135.644	78.366.420.899	1,64%	8,30%	843.854.884.745	10,66%	9,29%	89,39%	Instruktif
2011	1.163.858.404.192	87.912.458.185	10,86%	7,55%	1.048.902.371.007	19,55%	8,38%	90,12%	Instruktif
2012	1.323.837.610.516	105.463.320.984	16,64%	7,97%	1.171.437.194.032	10,46%	9,00%	88,49%	Instruktif
Rata-rata			12,85%	8,07%		11,25%	89,22%	9,04%	Instruktif

Hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Grobogan selama lima tahun anggaran selalu berubah-ubah pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 8,21% dan 10,22%. Pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 9,29% dan 8,38%, sedangkan pada tahun 2012 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 9,00%. Sehingga selama lima tahun anggaran rata-ratanya sebesar 9,04% yang berada pada skala interval 0,00%-25% dengan pola yang dihasilkan *instruktif*, dimana peran pemerintah pusat masih dominan dalam menjalankan otonomi daerah.

2. Rasio DDF = $\frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$

TA	PAD	TPD	Rasio DDF (%)	Keterangan
2008	59.924.849.995	813.076.812.507	7,37	Sangat Kurang
2009	77.079.602.181	843.180.476.379	9,14	Sangat Kurang
2010	78.366.420.899	943.967.135.644	8,30	Sangat Kurang
2011	87.912.458.185	1.163.858.404.192	7,55	Sangat Kurang
2012	105.463.320.984	1.323.837.610.516	7,97	Sangat Kurang
Rata-rata			8,07	Sangat Kurang

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio desentralisasi fiskal pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 7,37% dan 9,14%. Selanjutnya pada tahun 2010, 2011 dan pada tahun 2012 sebesar 8,30%, 7,55% dan 7,97%. Dengan kata lain, berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Grobogan selama lima tahun anggaran dalam kategori *sangat kurang*, berada pada skala interval 00,00% - 10,00% dengan rata-rata sebesar 8,07%.

3. Rasio Indeks kemampuan rutin = $\frac{PAD}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$

TA	PAD	Pengeluaran Rutin	Rasio IKR	Keterangan
2008	59.924.849.995	686.832.058.005	8,72%	Sangat kurang
2009	77.079.602.181	689.545.059.235	11,18%	Sangat kurang
2010	78.366.420.899	809.159.332.529	9,68%	Sangat kurang
2011	87.912.458.185	1.001.224.100.346	8,78%	Sangat kurang
2012	105.463.320.984	1.011.625.790.736	10,43%	Sangat kurang
Rata-rata			9,76%	Sangat kurang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio indeks kemampuan rutin pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 8,72% dan 11,18%. Selanjutnya pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 9,68% dan 8,78%. Pada tahun 2012 sebesar 10,43 %. Jadi, selama lima tahun anggaran pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki rasio IKR dalam kategori sangat kurang karena masih berada dalam skala interval antara 0,00%-20,00% yaitu dengan rata-rata sebesar 9,76%.

4. Rasio Keserasian:

a. Rasio belanja operasi = $\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja APBD}}$

$$b. \text{ Rasio belanja modal} = \frac{\text{Total Belanja modal}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

TA	Total Belanja (Rp)	Belanja Operasi		Belanja Modal		R. Blj. Operasi (%)	R. Blj. Modal (%)
		Rp	Perkembangan	Rp	Perkembangan		
2008	870.652.060.324	686.832.058.005	-	183.054.245.219	-	78,89	21,02
2009	813.339.696.881	689.545.059.235	0,39%	97.471.895.670	(87,80%)	84,78	11,98
2010	902.227.716.016	809.159.332.529	14,78%	91.688.215.123	(6,31%)	89,68	10,16
2011	1.173.213.711.868	1.001.224.100.346	19,18%	161.321.536.776	43,16%	85,34	13,75
2012	1.203.540.602.867	1.011.625.790.736	1,03%	190.074.980.581	15,13%	84,05	15,79

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keserasian pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2008-2012 lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal. Sehingga pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menekan besarnya alokasi dana untuk belanja operasi guna dialokasikan untuk belanja modal guna menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.

5. Rasio Pertumbuhan:

- Pertumbuhan PAD = $\frac{PAD\ Pn - Pn-1}{PAD\ Pn-1} \times 100\%$
- Pertumbuhan total pendapatan = $\frac{\text{Pendapatan } Pn - Pn-1}{\text{Pendapatan } Pn-1} \times 100\%$
- Pertumbuhan belanja operasi = $\frac{\text{Belanja Operasi } Pn - Pn-1}{\text{Belanja Operasi } Pn-1} \times 100\%$
- Pertumbuhan belanja modal = $\frac{\text{Belanja Modal } Pn - Pn-1}{\text{Belanja Modal } Pn-1} \times 100\%$

TA	Realisasi PAD	Total Pendapatan	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Modal	Pertumb. PAD	Pertumb. Pendapatan	Pertumb. Belanja Operasi	Pertumb. Belanja Modal
2008	59.924.849.995	813.076.812.507	686.832.058.005	183.054.245.219	-	-	-	-
2009	77.079.602.181	843.180.476.379	689.545.059.235	97.471.895.670	28,63%	3,70%	0,40%	(46,75%)
2010	78.366.420.899	943.967.135.644	809.159.332.529	91.688.215.123	1,67%	11,95%	17,35%	(5,93%)
2011	87.912.458.185	1.163.858.404.192	1.001.224.100.346	161.321.536.776	12,18%	23,29%	23,74%	75,95%
2012	105.463.320.984	1.323.837.610.516	1.011.625.790.736	190.074.980.581	19,96%	13,75%	1,04%	17,82 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pada rasio pertumbuhan pemerintah Kabupaten Grobogan selama lima tahun anggaran mengalami pertumbuhan yang *fluktuatif* dengan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 15,61%, namun peningkatan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja modal, tetapi diikuti oleh pertumbuhan belanja operasi.

6. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD:

- Rasio efektifitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$

TA	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2008	50.721.201.000	59.924.849.995	118,15%	Efektif
2009	55.867.671.575	77.079.602.181	137,97%	Efektif
2010	66.800.673.000	78.366.420.899	117,31%	Efektif
2011	84.349.354.734	87.912.458.185	104,22%	Efektif
2012	88.139.303.000	105.463.320.984	119,66%	Efektif

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun anggaran mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2012 pemerintah

Kabupaten Grobogan memiliki rasio efektivitas yang selalu berubah-ubah atau bersifat fluktuatif, namun dapat dikatakan kalau pemerintah Kabupaten Grobogan mampu mempertahankan rasio efektifitasnya untuk berada diatas 100% atau sudah *efektif*.

$$b. \text{ Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
Pajak Daerah	9.164.095.556	11.177.230.232	15.104.906.059	14.990.198.823	18.690.718.677
Retribusi Daerah	29.910.218.734	46.188.968.326	48.749.800.832	14.261.854.045	15.134.904.001
Jumlah	39.074.314.290	57.366.198.558	63.854.706.891	29.252.052.868	33.825.622.678
Biaya Pemerolehan	1.953.715.715	2.868.309.928	3.192.735.345	1.462.602.643	1.691.281.134
Realisasi PAD	59.924.849.995	77.079.602.181	78.366.420.899	87.912.458.185	105.463.320.984
Rasio Efisiensi	3,26%	3,72%	4,07%	1,66%	1,60%
Kriteria	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien

Biaya pemerolehan PAD pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar 5% dari potensi riil PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi PAD pemerintah Kabupaten Grobogan selama lima tahun anggaran mengalami perubahan yang *fluktuatif*. Meski, demikian secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam merealisasikan PADnya (dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah) sudah dapat dikategorikan *efisien*, terbukti dari rasio efisiensi PAD yang dicapai kurang dari 100%.

$$7. \text{ Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

TA	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Rasio Pengelolaan Belanja
2008	813.076.812.507	870.652.060.324	-57.575.247.817	93,39%
2009	843.180.476.379	813.339.696.881	29.840.779.498	103,67%
2010	943.967.135.644	902.227.716.016	41.739.419.628	104,63%
2011	1.163.858.404.192	1.173.213.711.868	-9.355.307.676	99,20%
2012	1.323.837.610.516	1.203.540.602.867	120.297.007.649	109,99%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2008 rasio pengelolaan belanja sebesar 93,39% yang menunjukkan defisit anggaran sebesar Rp. 57.575.247.817,00, pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 103,67% dan 104,63% dan menunjukkan surplus anggaran sebesar Rp. 29.840.779.498,00 dan Rp. 41.739.419.628,00, tahun 2011 sebesar 99,20% dengan defisit anggaran sebesar Rp. 9.355.307.676,00. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 109,99% dan menunjukkan surplus anggaran sebesar Rp. 120.297.007.649,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan belanja pemerintah Kabupaten Grobogan selama lima tahun anggaran dikatakan baik karena meningkatnya realisasi atas pendapatan dari pemerintah Kabupaten Grobogan seperti PAD dan DAK. Selain itu, peningkatan tersebut juga disertai dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menekan realisasi atas belanja dari target yang telah direncanakan, sehingga total belanja pemerintah Kabupaten Grobogan lebih rendah dari pada total pendapatan.

Dari perhitungan analisis rasio diatas, berikut adalah hasil secara keseluruhan yang digunakan untuk memperlihatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan selama lima tahun anggaran (2008-2012):

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata	Pola
Rasio Kemandirian	8,31%	10,22%	9,29%	8,38%	9,00%	9,04%	Instruktif
Rasio DDF	7,37%	9,14%	8,30%	7,55%	7,97%	8,07%	Sangat Kurang
Rasio IKR	8,72%	11,18%	9,68%	8,78%	10,43%	9,76%	Sangat Kurang
Rasio Kesenjangan:							
a. rasio belanja operasi	78,89%	84,78%	89,68%	85,34%	84,05%	84,55%	-
b. rasio belanja modal	21,02%	11,98%	10,16%	13,75%	15,79%	14,54%	-
Rasio Pertumbuhan:							
a. Pertumbuhan PAD	-	28,63%	1,67%	12,18%	19,96%	15,61%	-
b. Pertumb. Pendapatan	-	3,70%	11,95%	23,29%	13,75%	13,17%	-
c. Pertumb. Blj. Operasi	-	0,40%	17,35%	23,74%	1,04%	10,63%	-
d. Pertumb. Blj. Modal	-	(46,75%)	(5,93%)	75,95%	17,82%	10,27%	-
Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD:							
a. rasio efektivitas	118,15%	137,97%	117,31%	104,22%	119,66%	119,46%	Efektif
b. rasio efisiensi	3,26%	3,72%	4,07%	1,66%	1,60%	2,86%	Efisien
Rasio Pengelolaan Belanja	93,39%	103,67%	104,63%	99,20%	109,99%	102,18%	-

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja pemerintah Kabupaten Grobogan selama lima tahun anggaran berdasarkan analisis rasio dalam mengelola keuangan daerahnya adalah baik. Dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD dikategorikan sudah efektif dan efisien. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, seperti tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Grobogan yang masih rendah dan aktivitas pemerintah dalam mengalokasikan dana yang sebagian besar untuk belanja operasi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2008-2012 dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan dari analisis rasio, rata-rata kinerja pemerintah Kabupaten Grobogan selama lima tahun anggaran dalam mengelola keuangan daerahnya adalah baik. Dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD dikategorikan sudah efektif dan efisien. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, seperti kemandirian keuangan Kabupaten Grobogan yang masih rendah dan aktivitas pemerintah dalam mengalokasikan dana yang sebagian besar untuk belanja operasi.

2. Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian ini antara lain periode penelitian yang pendek, penelitian ini tidak menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga tidak dapat memperoleh hasil analisis yang lengkap, perhitungan penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan sehingga tidak didapat hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.

3. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan demi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- b. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya yang ada khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebaiknya mengetahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran setiap tahunnya, sehingga untuk kedepannya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.
- d. Memberikan penyuluhan dan meningkatkan mutu pelayanan publik agar masyarakat lebih tertib membayar pajak dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Bisma, I Dewa Gde dan Susanto, Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. GaneÇ Swara Edisi Khusus, Vol. 4, No.3, Desember.
- Boedi, Soelistijono. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Jurnal SPREAD, Volume 2, Nomor 2, Oktober.
- Djanegara, Moermahadi Soerja dan Wakhyudi. 2007. *Analisis Keterkaitan Rasio Keuangan Daerah Dalam Pengukuran kinerja (Studi Kasus Pada Setda Kabupaten Bogor)*. Jurnal Ilmiah Kesatuan, Nomor 2, Volume 9, Oktober.
- Fathoni, Faiq. 2012. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Aspek Keuangan Tahun Anggaran 2007-2010*. (Tidak Dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2002. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- , 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Paidi, Wahyu Aryo Pratomo dan D. Agus harjito. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran Di Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 3, Desember Hal 213-222.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Karay, Jonathan Cosmus. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura Sebelum dan Sesudah Otonomi Khusus*. Jurnal DINAMIS, Vol. 2, No.12, Desember Hal 32 – 41.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- , 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohamad, Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Muslich, Muhammad. 2003. *Manajemen Keuangan Modern*. Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasir, Azwir dan Darlis, Edfan. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Al Fino Losa. Universitas Negeri Padang, Volume 1.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang *Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*.
- Powa, Yurikhe Junitha dan Wokas, Heince. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2008-2010*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, Volume 3, Nomor 1, Juni.
- Rinaldi, Udin. 2012. *Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal EKSOS, Volume 8, Nomor 2, Juni.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA Bandung.
- Suryo, Raharjo. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008-2010*. (Tidak Dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Wahyuni, Nanik. 2010. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Malang*. Jurnal Publikasi. UIN MALIKI Malang, Vol. 1, No. 1.